

Pengembangan Sistem Informasi Gampong Berbasis Digital di Gampong Lam Bheu

Siti Zahara

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: 200802053@student.ar-raniry.ac.id

Marni Safitri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: 200802049@student.ar-raniry.ac.id

Nova Amalia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: 200802052@student.ar-raniry.ac.id

Taufik

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: taufik.fisip@student.ar-raniry.ac.id

DOI: 10.22373/jrpm.v4i1.3801

Abstract

Digitalization of villages in a more targeted village development effort and in order to improve quality, especially in the implementation of village government, is a central government program with the slogan "building Indonesia from the villages". One of them is in terms of providing services to the community by utilizing digitalization such as the Gampong Information System Application (SIGAP), Gampong Information System (SID), and Information and Documentation Management Officer (PPID). The method used in this research is a qualitative method carried out directly through observation and interviews. The research results show that the development of Gampong digitalization relies on support from the Central Government, human resources, Community Participation, and Gampong Autonomy are important factors so that the program can run smoothly, effectively and efficiently. Furthermore, of the three applications the SID application is superior to the SIGAP application, while the PPID application has its own features

Keywords: *pengembangan; sistem informasi gampong; digital*

Abstrak

Digitalisasi desa dalam upaya pembangunan desa yang lebih terarah dan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan program pemerintah pusat dengan slogan "membangun Indonesia dari desa". Salah satunya dalam hal pemberian pelayanan kepada Masyarakat dengan pemanfaatan Digitalisasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP), Sistem Informasi Gampong (SID), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang dilakukan secara langsung melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan digitalisasi Gampong bertumpu pada dukungan Pemerintah Pusat, sumber daya manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Otonomi Gampong menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Selanjutnya, dari ketiga aplikasi tersebut aplikasi SID lebih unggul dari aplikasi SIGAP, sedangkan aplikasi PPID mempunyai fitur tersendiri.

Kata Kunci: *development; village information systems; digital*

A. Pendahuluan

Pemerintah Desa salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang sangat sering bersentuhan dengan pelayanan data kependudukan. Permasalahan utama yang sering ditemukan di tingkat desa umumnya adalah data kependudukan tidak tersusun dengan baik dan mudah untuk ditemukan.¹ Agar informasi dapat dikomunikasikan secara cepat dan tepat, maka tata cara pengumpulan data kependudukan, pengisian format, pengolahan, dan penyajian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tentunya harapan masyarakat desa layanan dan informasi kependudukan bisa terdigitalisasi.² Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penyimpanan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia.

Digitalisasi desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih terarah dan meningkatkan daya saing dan berkualitas merupakan program pemerintah pusat dengan

¹ Valian Yoga Pudya Ardhana, "Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web," *SainsTech Innovation Journal* 2, no. 2 (2019): 1–5, <https://doi.org/10.37824/sij.v2i2.2019.99>.

² Kusroh Lailiyah, "Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance," *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 6, no. 2 (2022): 26–34, <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>.

slogan "membangun Indonesia dari desa". Komponen penting dari inisiatif ini adalah mempercepat pembangunan desa berbasis digitalisasi. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan tuntutan skenario yang dengan cepat mendekati apa yang dikenal sebagai "era digital". Era digital tidak mungkin bisa dihindari. Kemajuan teknologi menjadikan pelayanan publik semakin mudah diakses oleh masyarakat. Program digitalisasi desa semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima dari penyelenggaraan pemerintahan desa.³

Adapun keunggulan sistem digitalisasi desa antara lain: (a) Kependudukan, yang mencakup database penduduk desa dan menyediakan sarana pengumpulan informasi dan masukan penduduk, menjamin keakuratan dan ketepatan waktu data; (b) Pelayanan publik, seperti fungsi administratif, lebih cepat dan dapat diakses secara online sepanjang waktu, serta pemutakhiran informasi lebih transparan; (c) Perencanaan Pembangunan dan Penggunaan Anggaran, yang memuat laporan pembangunan dan penggunaan anggaran yang lebih tepat dan transparan; (d) Akses Perekonomian dan Transaksi Desa, yaitu mencakup cara memasarkan produk desa melalui e-commerce yang mudah diakses melalui dunia maya dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Akses terhadap layanan e-banking, PPOB, dan sumber daya lainnya menjadi lebih mudah diperoleh.⁴

Pemanfaatan digitalisasi desa sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam aturan tersebut menjelaskan desa-desa di nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menjelaskan penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi.⁵

Salah satu desa atau istilah di Aceh di sebut Gampong yang memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah Gampong Lam Bheu. Gampong Lam Bheu merupakan salah satu desa yang berstatus sebagai desa

³ S. A. Mardiyani, "Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi," 2020.

⁴ K. Lailiyah, "Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang 6*, no. 2 (2022): 26–34

⁵ E. A. R. & B. R. Wijaya, "Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013.

mandiri terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah penduduk 7.278 jiwa.⁶ Gampong ini memiliki keunggulan dalam hal tata kelola administrasi desa. Salah satunya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan digitalisasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP), Sistem Informasi Gampong (SID), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemanfaatan aplikasi tersebut dapat memudahkan dalam proses pelayanan kepada masyarakat desa. Sehingga dengan berkembangnya sistem informasi gampong berbasis digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengentaskan permasalahan ataupun hambatan yang ada di Gampong Lam Bheu melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.⁷

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penelusuran dokumen, dan wawancara dengan aparatur gampong guna memperoleh data yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti.

Fokus artikel ini membahas mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Gampong berbasis Digital dalam pelayanan administrasi di Gampong Lam Bheu. Observasi dilakukan dengan melihat penggunaan sistem informasi gampong dalam pelayanan kepada masyarakat, dan wawancara yang dilakukan dengan petugas aparatur gampong yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengembangan digital di Gampong Lam Bheu

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga aplikasi yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan serta informasi Gampong. Sehingga dapat dikatakan sistem informasi gampong berbasis digital di Gampong Lam Bheu sudah cukup baik. Ketiga aplikasi yang digunakan tersebut yaitu:

1. Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

SIGAP merupakan sebuah sistem terpadu yang dibuat oleh Pemerintah Aceh yang dapat di akses melalui website: <https://sigapaceh.id/>. Aplikasi ini berfungsi

⁶ “QANUN GP NOMOR 5 TA 2019 TENTANG RPJM PERIODE 2019-2025.Pdf,” n.d.

⁷ Irfan Nursetiawan, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 72–81.

sebagai wadah layanan keterbukaan informasi publik. Kegunaan aplikasi SIGAP yaitu untuk memperoleh informasi data tentang gampong baik berupa jumlah penduduk, aparatur desa, sejarah gampong, potensi desa dan lain sebagainya yang disajikan melalui aplikasi SIGAP ini. Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi ini disalurkan kepada masyarakat Gampong Lam Bheu, khususnya perangkat desa, antara lain kepala desa, sekretaris, bendahara, dan tuha peut, serta para pelaku UMKM/UMKG setempat. sehingga informasi yang dimasukkan ke dalam program SIGAP tepat dan tersedia bila diperlukan.⁸

2. Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunitas di tingkat Gampong. Keberadaan SID penting setidaknya karena dua alasan. Pertama, tujuan tercapainya akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan pemerintah desa berarti SID berfungsi sebagai instrumen demokrasi selain sebagai alat pengolahan informasi. Kedua, SID merupakan instrumen digital yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Gampong karena banyak data kependudukan yang tersebar dan tidak dikumpulkan secara cermat dalam arsip pemerintah.⁹

SID dapat dimanfaatkan pada website Gampong sebagai media promosi dan penyebaran informasi Gampong selain untuk menyimpan data kependudukan. Manfaat yang diharapkan dari SID bagi pemerintahan Gampong adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, kemudahan akses informasi Gampong bagi Masyarakat kantor Gampong yang efisien dan efektif, serta administrasi Gampong yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun yang membedakan aplikasi SID dengan SIGAP yaitu aplikasi SID ini dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan mandiri (Permohonan Surat, cetak KK, dll), dimana masyarakat dapat membuat akun pribadi dengan mengisi biodata sebagai syarat pembuatan akun. Setelah itu masyarakat dapat memperoleh

⁸ Sumardi Efendi and Jovial Pally Taran, "Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien – Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)," *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–7.

⁹ Abdiansah Abdiansah et al., "Penerapan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID Di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan," *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 6 (2021): 1472–79, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5621..>

layanan sesuai yang diperlukannya. Sedangkan Aplikasi SIGAP tidak memiliki fitur layanan mandiri.

3. Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab mengumpulkan, melaporkan, menyimpan, memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi di lingkungan Gampong Lam Bheu. Masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi dengan lebih mudah dan sederhana menggunakan PPID karena hanya tersedia melalui satu pintu. PPID berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui web, lisan, dan tatap muka. Dengan demikian, masyarakat Gampong Lam Bheu akan lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka perlukan.¹⁰

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dipertegas oleh PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.¹¹ Terbitnya Peraturan Perundang-undangan tentang desa tersebut melahirkan kebijakan tentang desa untuk mampu dengan leluasa mengurus rumah tangganya sendiri (desa otonom), hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan inovasi desa. Desa saat ini dipandang mampu berinovasi dan berkembang guna mengurangi permasalahan yang mereka hadapi. Desa diimbau untuk maju dan mandiri guna mewujudkan beragam potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desa.

Ada beberapa hambatan dalam Pengembangan Sistem Informasi Gampong Berbasis Digitalisasi, terutama dalam menginput data ke dalam aplikasi sistem informasi gampong tersebut, yang dipengaruhi oleh partisipasi Masyarakat. perolehan data awal dari lapangan, yang sulit didapatkan. Masyarakat terkesan mengabaikan pemanfaatan teknologi informasi dengan alasan ketidak mampuan menggunakannya, sehingga lebih memilih penggunaan layanan secara konvensional. Padahal

¹⁰ Dhara Aprilya and Said Fadhlain, "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 06 (2022): 752–63, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i6.444>.

¹¹ Toby Putra Kusuma et al., "Analisis Tantangan Dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa," *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2022): 100, <https://doi.org/10.31602/as.v7i2.6362>.

perkembangan yang sangat pesat mampu memberikan pengaruh besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk di dunia Pendidikan.

Kemudian, dari segi sumber daya manusia, perubahan global akibat kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia hingga diperlukan adaptasi, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) harus siap memanfaatkan digitalisasi di era digital ini. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang telah memasuki pasar kerja dan penyiapan calon tenaga kerja yang sudah bersekolah demi menyukkseskan tumbuhnya digitalisasi desa merupakan dua tujuan utama penyiapan sumber daya manusia.

Aparatur pemerintahan desa dan sumber daya manusia produktif harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan tetap terhubung. Peluang keberhasilan digitalisasi desa dimungkinkan berkat kinerja pemerintah yang sangat baik dan produktif. Ketika teknologi digital digunakan dengan tepat, hasilnya pun akan sama. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan birokrasi pemerintahan desa, meningkatkan reputasi desa, meningkatkan produktivitas aparatur desa, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat gampong itu sendiri.

Hambatan selanjutnya yang paling berpengaruh adalah dari pemerintah pusat, kurangnya keseriusan dari sektor pemerintah menjadi sebuah tantangan bagi aparatur gampong dan juga bagi pemerintah itu sendiri, karena kurangnya minat tenaga kerja pemerintah dapat menghambat sebuah program yang telah dirancang. Seperti beberapa fitur di dalam aplikasi tersebut yang tidak bisa di akses. Untuk itu perlu keseriusan pemerintah pusat dalam pembaharuan atau pengembangan sistem informasi gampong berbasis digital sehingga dapat memudahkan aparatur gampong dalam menginput data.

C. Simpulan

Pengembangan Digitalisasi di Gampong Lam Bheu terdapat potensi dan tantangan. Potensi pada pengembangan digitalisasi Gampong yang bertumpu pada Dukungan Pemerintah Pusat, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Otonomi Gampong menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Digitalisasi Gampong ini akan memberikan manfaat dalam pengoptimalan sistem pemerintahan gampong yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya digitalisasi desa mampu menimbulkan potensi peningkatan pelayanan birokrasi.

Adapun yang membedakan dari ketiga aplikasi tersebut, yaitu dalam aplikasi SID masyarakat dapat memperoleh layanan mandiri (Permohonan Surat, cetak KK, dll), dimana masyarakat dapat membuat akun pribadi dengan mengisi biodata sebagai syarat pembuatan akun. Sedangkan Aplikasi SIGAP tidak memiliki fitur layanan mandiri. Dan untuk aplikasi PPID ini fokus pada perolehan informasi Gampong bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansah, Abdiansah, Alvi Syahrini Utami, Novi Yusliani, Kanda Januar Miraswan, and Ahmad Fali Oklilas. "Penerapan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID Di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 6 (2021): 1472–79. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5621>.
- Aprilya, Dhara, and Said Fadhlain. "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 06 (2022): 752–63. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i6.444>.
- Ardhana, Valian Yoga Pudya. "Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web." *SainsTech Innovation Journal* 2, no. 2 (2019): 1–5. <https://doi.org/10.37824/sij.v2i2.2019.99>.
- E. A. R. & B. R. Wijaya. "Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4227/3567>.
- Efendi, Sumardi, and Jovial Pally Taran. "Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien – Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)." *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 . 2022.
- Kusuma, Tobby Putra, Asep Nurjaman, Salahudin Salahudin, and Sitna Hajar Malawat. "Analisis Tantangan Dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa." *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2022): 100. <https://doi.org/10.31602/as.v7i2.6362>.

Lailiyah, Kusroh. “Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance.” *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 6, no. 2 (2022): 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>.

Nursetiawan, Irfan. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 .2018. “QANUN GP NOMOR 5 TA 2019 TENTANG RPJM PERIODE 2019-2025.Pdf,” n.d.

S. A. Mardiyani. “Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi,” 2020.